

PERKARA PENTING PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2024, Indonesia Re tidak mempunyai permasalahan hukum yang masuk dalam ranah litigasi, baik itu yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri setempat, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Arbitrase Luar Negeri, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

No.	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Completion Status	Pengaruh terhadap Perusahaan Impact on the Company
1	Nil	Nil	Nil
2	Nil	Nil	Nil
3	Nil	Nil	Nil

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2024, Indonesia Re Group secara umum senantiasa berusaha memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. terdapat satu sanksi administratif diterima Indonesia Re dan telah dicabut pada awal tahun 2025, sedangkan untuk RSI menerima dua sanksi yang juga telah dicabut, sementara Asei tidak menerima sanksi, Indonesia Re Group berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan kepatuhan dan tata kelola perusahaan guna memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

LEGAL CASES

In 2024, Indonesia Re has no legal problems that fall into the realm of litigation, whether it is being litigated in the local District Court, High Court, Supreme Court, Indonesian National Arbitration Board (BANI), Foreign Arbitration, and the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK).

Administrative Sanctions

Throughout 2024, Indonesia Re Group generally continued to fulfill the applicable regulatory provisions. one administrative sanction was received by Indonesia Re and was revoked at the beginning of 2025, while RSI received two sanctions which have also been revoked, while Asei received no sanctions. Indonesia Re Group is committed to continuously improving the implementation of compliance and corporate governance to ensure full compliance with regulations and maintain stakeholder trust.